

---

# **Bima: *Dana*, *Dou*, dan *Rawi* Mbojo<sup>1</sup>**

---

Supaya tidak timbul salah pengertian, perlu dijelaskan mengenai dualisme nama Bima dan Mbojo, dua penyebutan yang populer dan bergantian digunakan oleh masyarakat Bima sendiri atas daerah mereka. Bima adalah sebutan dan nama dari wilayah administrasi Kabupaten Bima dan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dua daerah ini pada masa lampau adalah satu kesatuan dalam cakupan Kesultanan Bima, kemudian menjadi daerah Swapraja Bima pasca-kemerdekaan, serta Kabupaten Bima yang pada tahun 2002 mengalami pemekaran di mana salah satu dari kecamatannya (RasanaE) menjadi Kota Bima. Sementara itu, Mbojo adalah konsep etnisitas yang mencakup manusia dan budaya yang berbasis Bahasa Bima, meliputi kedua wilayah administrasi di atas, serta Kabupaten Dompu yang terletak di Pulau Sumbawa bagian tengah. Di kalangan masyarakat Bima sendiri terdapat anggapan bahwa nama Bima adalah nama resmi dalam bahasa Indonesia, sementara nama Mbojo adalah terjemahannya dalam bahasa Bima. Hal ini bisa dipahami dalam konteks Bima masa lampau sebelum terbagi-bagi ke dalam wilayah administrasi yang berbeda.

## **A. *Dana* Mbojo: Pertemuan Tradisi-tradisi**

*Dana* berarti tanah, sedangkan Mbojo adalah sebutan lokal untuk Bima, yakni sebuah entitas wilayah dan etnisitas yang terletak di paruh timur Pulau Sumbawa, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Sumbawa sendiri terdiri dari dua entitas wilayah dan etnisitas besar, yakni *tana* (tanah) Samawa di bagian barat, mulai dari Taliwang sampai Empang, yang didiami oleh orang-orang suku Samawa (*tau* Samawa), dan *Dana* (tanah) Mbojo di bagian timur, mulai dari Dompu sampai Sape, yang dihuni oleh orang-orang dari

---

<sup>1</sup> Disarikan dari disertasi penulis di Universitas Udayana Bali (2016) sebagai bahan diskusi pada acara *Lawatan Sejarah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 29 Nopember 2019 di Mataram.

suku Mbojo (Dou Mbojo). Sebagai sebuah wilayah, Bima – di luar wilayah Kabupaten Dompu – tidak lain dari bekas daerah kekuasaan Kesultanan Bima, sekarang terpisah ke dalam dua wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Bima dan Kota Bima.



**Gambar 1: Peta wilayah Bima**

Sumber: Diolah dari [www.wikipedia](http://www.wikipedia) dan [www.archipelagofastfact.wordpress.com](http://www.archipelagofastfact.wordpress.com)

Secara geografis, wilayah Bima berada pada posisi  $117^{\circ}40''$ - $119^{\circ}10''$  Bujur Timur dan  $70^{\circ}30''$  Lintang Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan laut Flores, sebelah utara dengan laut Jawa, sebelah selatan dengan samudra Hindia, dan sebelah barat dengan wilayah Kabupaten Dompu. Dari segi topografi, sebagian besar wilayah Bima, sekitar 70 persen, merupakan dataran tinggi (*highland*) dengan tekstur pegunungan. Pegunungan Donggo di sebelah barat dan pegunungan Wawo di sebelah timur adalah daerah-daerah dengan titik tertinggi yang mencapai 500m di atas permukaan laut. Tonggak-tonggak ketinggian itu berupa gunung-gunung besar (*doro*) yang terletak di beberapa titik, yakni Doro Sangia(ng) di sisi timur bagian utara, Doro Maria dan Doro Lambitu di sisi timur bagian selatan, Doro Soromandi di sisi utara bagian barat berhadapan dengan teluk Bima, serta Doro Tambora di bagian barat. Doro Soromandi di Kecamatan Donggo adalah gunung tertinggi di Bima, 4.775m di atas permukaan laut.

Sementara itu, Gunung Tambora melegenda karena letusan dahsyatnya pada 1815 mengakibatkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya sirna, yaitu Kerajaan Pekat, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Tambora, serta sampai mempengaruhi perubahan iklim di Eropa yang terkenal dengan '*year without summer*'. Karena itu, orang menyebut letusan Tambora sebagai '*Pompey of the east*' karena hampir setara letusan gunung Pompey di Italia.

Di samping rangkaian pegunungan itu, terdapat pula gunung-gunung dengan ukuran sedang yang bertebaran di beberapa wilayah, seperti Doro Londa di sisi selatan Kota Bima, Doro Lambu di Kecamatan Sape, Doro Belo di Kecamatan Belo, Doro Donggo Bolo di Kecamatan Bolo, Doro Parado di Kecamatan Monta, Doro Parewa di Kecamatan Woha, dan Doro Donggo di Kecamatan Donggo dan Madapangga. Sisa dari daerah pegunungan ini, sekitar 30 persen, adalah dataran rendah (*lowland*) yang merupakan lahan pemukiman, persawahan, dan perkebunan. Berbatasan dengan laut Flores di sebelah utara, selat Sape di sebelah timur, lautan Hindia di sebelah selatan menjadikan Bima sebagai daerah dengan budaya pesisir. Areal pemukiman yang ramai atau kota dengan ciri perdagangan terdapat di daerah pesisir ini seperti Kota Bima, Tente, Sila, Sape, dan Sanggar.

Di daerah pertemuan antara pegunungan dan dataran rendah atau antara pegunungan dengan daerah pantai, terutama sepanjang garis perbatasan dengan Kabupaten Dompu ke sebelah barat, terbentang pula sabana dan stepa (Bima: *so*) tempat binatang-binatang ternak berkembang biak. Di lahan-lahan seperti itu pula masyarakat menggantungkan hidup dengan berkebun atau berladang dan menjalankan praktik peternakan serta budaya bercocok tanam.

Daerah seluas 4596,90 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 419.302 jiwa (atau 500.000 gabungan antara penduduk Kabupaten Bima dan Kota Bima) inilah yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Dana Mbojo (tanah Bima).

Beriklim tropis dengan curah hujan rendah, Dana Mbojo termasuk kategori kering. Sawah tadah hujan lebih banyak dibanding sawah irigasi, menyebabkan pertanian dengan sistem perladangan menjadi praktik luas di masyarakat. Ini menjadikan orang Bima berbudaya pertanian (*peasant society*). Perdagangan berlangsung simultan dengan budaya pertanian, menjadi alternatif praktik

berekonomi. Perdagangan merupakan sektor yang menyediakan kesempatan paling banyak bagi masyarakat dalam mencari penghidupan setelah sektor pertanian. Perpaduan dua sektor ini menjadikan Bima sebagai salah satu daerah perdagangan yang penting di Nusantara, di mana hasil-hasil pertanian masyarakat, seperti bawang, kedelai, jagung, gabah atau beras, sayuran, juga binatang ternak diangkut keluar daerah sebagai komoditi dagang.

Daerah-daerah pesisir seperti Kota Bima, Sape, Tente, dan Sila sudah sejak lama dikenal sebagai pusat-pusat perdagangan. Pelabuhan Bima yang terletak di teluk Bima adalah bandar ramai dan penting di kawasan Indonesia timur. Karena bandarnya yang strategis inilah, maka di daerah ini berkembang sebuah kerajaan pesisir yang maju, yakni Kerajaan Bima pada abad ke-14 M yang kemudian bertransformasi menjadi Kesultanan Bima pada abad ke-16 M. Pada masa kini, Kota Bima yang secara geografis mewarisi pusat kekuasaan Kerajaan/Kesultanan Bima, adalah pusat perekonomian di wilayah Bima dan sekitarnya, di samping sebagai pusat kekuasaan karena di situlah birokrasi pemerintah digerakkan.

**Sejarah sosial Dana Mbojo.** Terutama era sebelum abad ke-16 diakui masih merupakan tantangan bagi penelusuran sejarah Bima. Jejak-jejak prasejarah, seperti prasasti batu tulis (*Wadu Tunti*) dan batu berpahat (*Wadu Pa'a*) yang ditemukan di daerah sebelah barat teluk Bima masih menyimpan misteri yang perlu diungkap (Casparis, 1998), tetapi menurut narasi dan hipotesis yang berkembang sebagai pengetahuan umum, Dana dan Dou Mbojo telah melewati beberapa fase hingga sampai pada masa kontemporer ini.

Fase pertama dikenal Zaman Naka, yaitu era prasejarah. Pada era ini manusianya belum mengenal tata peradaban yang mengatur kehidupan, orang-orang hidup nomaden mencari makan dengan berburu. Tidak banyak yang bisa diketahui dari era ini, tetapi dalam narasi imajiner yang berkembang di tengah masyarakat, Naka digambarkan sebagai sosok manusia sakti mandraguna, menguasai jagat masyarakat primitif. Para Naka inilah dipercaya menurunkan cikal bakal manusia yang mendiami wilayah Bima di kemudian hari.

Fase kedua adalah Zaman Ncuhi, saat orang-orang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang sudah mulai terstruktur dalam unit-unit kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Ncuhi

adalah sebutan untuk pihak otoritas yang menguasai dan mengontrol wilayah-wilayah sekitar. Ada lima Ncuhi utama yang dikenal dalam masyarakat Bima, yaitu Ncuhi Dara yang menguasai wilayah sekitar Doro Dara sampai wilayah Belo (wilayah Kota Bima sekarang), Ncuhi Dorowoni berada di wilayah timur sekitar Doro Woni ke timur sampai wilayah Sape, Ncuhi Banggapupa berada di wilayah bagian utara sampai di Wera, Ncuhi Parewa berada di wilayah bagian selatan di sekitar Doro Parewa sampai Belo, Woha, Monta, sedangkan Ncuhi Bolo berada di wilayah bagian barat meliputi Donggo dan Bolo.

Fase ketiga adalah Zaman Kerajaan, dimulai sejak abat ke-14 M dengan pengalihan kekuasaan para Ncuhi kepada seorang kesatria asing, konon dari Jawa bernama Sang Bima.<sup>2</sup> Peristiwa inilah yang ditandai oleh prasasti *Wadu Tunti* di daerah Asakota (pintu masuk teluk Bima) yang dianggap sebagai tonggak awal pembentukan Kerajaan Bima. Era ini juga dikenal sebagai masa berkembangnya kepercayaan Hinduisme dalam masyarakat Bima. Kebudayaan Hindu berkembang seiring dengan kedatangan dan penguasaan aristokrasi Jawa kepada masyarakat Bima yang berlangsung sampai abat ke-16 M ketika kerajaan ini beralih kepada kekuasaan Islam.

Fase keempat adalah Zaman Kesultanan, saat mana sistem kerajaan yang berdimensi Hindu bertransformasi ke sistem kekuasaan Islam, meskipun tampuk kekuasaan masih tetap dipegang secara turun temurun oleh garis keturunan (*londo*) Sang Bima, pendiri Kerajaan. Ini adalah era Islamisasi Bima yang menurut catatan *Bo* (naskah kronik istana Bima) dimulai sejak abad ke-16, tepatnya 1611 M, dihitung sejak La Ka'i raja Bima terakhir berkonversi ke Islam dan dinobatkan menjadi Sultan Bima pertama dengan nama Sultan Abdul Kahir. Dalam fase ini, integrasi agama (Islam) dan negara berlangsung melalui praktik pemerintahan

---

<sup>2</sup>Tentang siapa sang Bima itu terdapat berbagai spekulasi. Muslimin Hamzah, sejarawan Bima, beranggapan bahwa sang Bima yang termaktub dalam pahatan itu tidak lain adalah patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Dia datang ke Bima dalam rangka menunaikan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Gajah Mada menurut versi ini adalah nama lokal, dari gajah dan *mada* (saya). Diceritakan oleh setiap tokoh ini bertemu orang dalam perjalanan ekspedisinya di Pulau Sumbawa ia selalu memperkenalkan dirinya dengan berkata "la gaja mada" (gajah nama saya). Lihat La Nora, Mutiara Donggo (2008). Namun, dalam versi Bali, tokoh ini pun memiliki identifikasinya sendiri. Nama Gaja Mada berarti gajah gila (*mad elephant*), karena karakter tokoh ini yang tak kenal menyerah. Lihat McPhee (2000: 49).

berdasarkan syari'at Islam.

Fase Kelima adalah zaman Kontemporer yang dimulai dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1945 saat Kesultanan Bima di bawah Sultan Muhammad Salahuddin menyatakan dukungan dan melebur ke dalam NKRI. Sejak saat itu, Kesultanan Bima menjadi daerah otonomi dengan status Swapraja di bawah kepala daerah pertama Abdul Kahir II (dikenal dengan nama Putra Kahir), putra mahkota (*Jenateke*) Kesultanan Bima, anak dari Sultan Muhammad Salahuddin.

Di samping kelima fase tersebut terdapat fase sejarah yang tumpang tindih, yakni fase kolonial yang bersamaan dengan fase Kerajaan dan Kesultanan. Masuknya Belanda, juga Jepang, ke Bima – bersamaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia – memberi berpengaruh bagi transformasi sosial, politik, dan kultural pada masyarakat Bima. Dalam banyak hal juga melahirkan pertentangan dan pergolakan, terutama karena antara penguasa kolonial dan penguasa lokal memiliki basis teologi dan ideologi serta kultur yang berbeda bahkan berseberangan. Dari sini pula dimulai dialektika antara Islam dan Barat dalam ranah lokal di Dana Mbojo dengan coraknya yang dinamis antara antagonisme-protagonisme.

Pranata sosial berubah, antara lain dengan diperkenalkannya hukum-hukum Belanda menggantikan hukum adat dan hukum *Syara'* (Syari'at Islam) yang diterapkan sebelumnya. Kelembagaan *Mahkamah Syar'iyah* sebagai otoritas penyelenggara elemen-elemen hukum Islam di Dana Mbojo dilikuidasi dan selanjutnya diubah menjadi Yayasan Islam dengan aspek kewenangan lebih kecil. Terhapusnya lembaga ini membuat kontrol Istana Bima terhadap otoritas-otoritas lokal di bawahnya seperti imam masjid terpotong dengan sendirinya, dan pada gilirannya menghasilkan delegitimasi kekuasaan sultan di hadapan masyarakat. Pemberontakan-pemberontakan rakyat di Donggo (1907), di Ngali wilayah Belo (1908), dan di Dena wilayah Bolo (1910) yang berlangsung pada masa Sultan Ibrahim (1881-1915) mencerminkan adanya ketidaksetujuan politik dan resistensi kultural masyarakat Bima yang Muslim terhadap intervensi dan hegemoni penjajah yang 'kafir' (orang Bima menyebut penjajah Belanda sebagai kafir).

Pemberontakan yang diawali dengan pembangkangan sipil pada bayar pajak itu sekaligus juga menunjukkan perlawanan kaum

agamawan terhadap praktik penguasaan yang *dholim*. Ini juga menjadi preseden dari perlawanan-perlawanan rakyat terhadap otoritas kekuasaan (istana Bima) pada era-era selanjutnya seperti perlawanan masyarakat Donggo pada era modern (masa kepemimpinan bupati Suharmadji) 1972. Kehadiran penguasa Jepang yang menggantikan Belanda juga direspons dengan berbagai perlawanan. Perlawanan kultural yang paling menghujam dalam ingatan masyarakat adalah pembangkangan sipil menolak praktik “geisha” tentara Jepang dengan cara melakukan *Nika Baronta*, pernikahan dadakan untuk menghindari penculikan para gadis atau perawan oleh tentara Jepang untuk dijadikan *jugin ianfu* (wanita pemuas nafsu serdadu Jepang). Dengan demikian, hadirnya kolonialisme di Dana Mbojo memberi andil pada munculnya pola pikir baru dan tindakan kultural seperti pembangkangan dan budaya tanding.

Fase-fase historis masyarakat Bima ini bukan saja mengenai jatuh-bangun kekuasaan, tetapi juga mencerminkan pembentukan dan transformasi budaya. Tradisi animisme dan dinamisme berkembang pada masa-masa awal terutama pada era Naka dan Ncuhi, kemudian masuk tradisi Hindu yang diperkenalkan oleh kedatangan Sang Bima dan menjadi sendi budaya pada zaman Kerajaan, dan akhirnya Islam mendominasi budaya Bima ketika sistem kekuasaan beralih kepada sistem Islam pada zaman Kesultanan.

Dari kelima fase itu, fase Islamisasi merupakan fase penting dalam pembentukan identitas orang Bima. Identitas Islam di Bima begitu kental. Tanggal 5 Juli 1611, hari dinobatkannya Sultan Abdul Kahir, telah ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bima, bahkan sebelum terjadi pemekaran wilayah menjadi dua daerah administratif kabupaten dan kota pada 2002.

## **B. Dou Mbojo: *Outsider***

*Dou* Mbojo, orang-orang yang tinggal di *Dana* Mbojo (tanah/daerah Bima), adalah kelompok etnis yang berakar dari bangsa Austronesia yang datang ke Pulau Sumbawa 2000 tahun sebelum Masehi (Muller 1997: 83). Mereka adalah bagian dari Proto-Malayan Austronesia (bangsa Melayu) yang mendiami wilayah Nusantara dengan ciri-ciri fisik yang tipikal, yakni berkulit sawo

matang, mata coklat, berambut lurus, dan berhidung pesek.

Dalam proses evolusinya, orang-orang ini mendiami wilayah-wilayah dataran rendah dan pesisir dari Pulau Sumbawa bagian timur, terutama di daerah-daerah di seputar teluk Bima yang subur yang memungkinkan mereka melakukan pencaharian hidup melalui bertani, melaut, atau berburu. Di antara mereka ada juga yang mendiami daerah-daerah pesisir bagian selatan seputar teluk Waworada, bagian barat di teluk Cempi, bagian timur di Sape dan Lambu, serta pesisir utara di sekitar Pulau Sangiang. Mereka hidup berkelompok dan membentuk organisasi sosial berupa klan-klan, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Ncuhi *ro* Naka (*ro*: dan, bahasa Bima).

Ncuhi *ro* Naka adalah pengelompokan sosial yang mendiami wilayah tertentu, terbentuk berdasarkan kekerabatan dan keturunan, yang secara alamiah menjadi unit kekuasaan di wilayah dan klan di bawah pimpinan seorang yang juga disebut Ncuhi. Personifikasi wilayah dengan Ncuhi sebagai personal menggambarkan ikatan yang kuat antara orang-orang dengan tanahnya. Istilah Ncuhi *ro* Naka sama-sama merujuk kepada sosok kepala suku, hanya menjadi pembeda berdasarkan periodisasi. *Naka* adalah prototipe masyarakat Bima pada masa-masa awal, sedangkan Ncuhi masa berikutnya. Pembeda antara keduanya adalah bahwa Naka belum memiliki kekuasaan atas wilayah meskipun sudah mempunyai klan, karena mereka masih hidup secara nomaden, berpindah-pindah dari wilayah satu ke wilayah lain; sedangkan Ncuhi sudah memiliki wilayah kekuasaan dan mempraktikkan cara hidup bertani (Alan Malingi, 43, sejarawan Bima, wawancara 11 Agustus 2012).

Dalam penuturan sejarah disebutkan selain dikenal lima Ncuhi besar sebagaimana disebut di atas, juga terdapat Ncuhi lain yang menguasai wilayah besar namun tidak diakui atau menyempal. Diskursus terkini (awal 2014) di kalangan pemerhati Bima berkembang asumsi adanya unit kekuasaan lain di luar lima Ncuhi itu, yaitu Ncuhi Doro Rasa yang kemudian bertransformasi menjadi Kerajaan Kalepe – bersamaan dengan masa Kerajaan Bima - yang menguasai wilayah pesisir selatan, tepatnya di Wane. Asumsi ini berkembang berdasarkan artefak yang ditemukan di beberapa situs purbakala di daerah itu berupa istana batu dan kuburan kuno serta hidupnya cerita rakyat atau legenda La Bibano di kalangan



masyarakat Wane dan Parado.

Ncuhi *ro* Naka merupakan prototipe sejarah masyarakat Bima awal yang berkembang berabad-abad sampai hadirnya gelombang migrasi di wilayah itu yang diperkirakan berlangsung pada abad ke-13. Kehadiran migrasi manusia dari wilayah-wilayah lain Nusantara dan negeri-negeri maritim di luar Nusantara seperti Gujarat (India), Hadramaut, dan Tiongkok tak bisa dielak untuk memasuki daerah-daerah di Pulau Sumbawa, seiring dengan berkembangnya merkantilisme. Pulau Sumbawa yang membentang di jalur perdagangan Nusantara menjadi singgahan bahkan dimukimi oleh para pedagang dan pelayar dari luar. Apalagi teluk Bima sudah sejak lama dikenal oleh para pelayar sebagai tempat berlabuh yang aman tatkala badai lautan Jawa dan Flores menghentikan pelayaran mereka dari barat Nusantara ke bagian timur dan sebaliknya.

Pilihan para pelayar untuk berlindung di teluk Bima lambat laun menjadikan wilayah pesisir Bima sebagai bandar penting dalam perdagangan lintas pulau, yang membuat daerah-daerah ‘tak bertuan’ itu mulai terisi manusia lain, baik untuk transit maupun bermukim. Di sini pula para petualang maritim menemukan kekayaan alam yang bisa menjadi komoditi perdagangan, seperti buah, rempah-rempah, perikanan, dan binatang buruan. Lambat laun pula terbentuklah ‘kota-kota kecil’ di sekitar teluk, seperti RasanaE di sisi timur teluk (sekarang Kota Bima, sebagai pusat ekonomi dan birokrasi pemerintah), Tente di sisi selatan teluk (sebagai kota jangkar bagi wilayah Bima bagian selatan), dan Sila di sisi barat daya teluk (salah satu pusat perdagangan dan menjadi jangkar bagi wilayah-wilayah barat teluk).

Orang Bima menamakan pintu masuk ke teluk Bima dengan Asakota. Dalam bahasa Bima, *asa* berarti mulut, *kota* berarti kota. Jadi Asakota adalah pintu masuk utama ke dalam wilayah Bima. Di mulut teluk, di sisi barat, terdapat artefak berupa prasasti dalam bentuk batu berpahat, *Wadu Pa'a* (batu pahat), yang diyakini sebagai perjanjian politik tertulis yang menandai penyerahan kekuasaan wilayah dari para Ncuhi kepada Sang Bima, seorang kesatria dari Jawa. Terlepas dari perdebatan mengenai hal ini, yang jelas situs purbakala itu penanda bahwa daerah Bima telah dijajah dan dimasuki oleh penduduk asing sejak lama. Dari sinilah masa ‘sejarah’ Bima dimulai.

RasanaE (kampung besar) menjadi daerah pemukiman paling ramai karena posisinya di daerah bandar Bima dan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Di sini pula pada zaman dahulu klan Ncuhi Dara bermukim dan karena posisi dan pengaruh geografisnya menjadikannya sebagai pusat bagi ncuhi-ncuhi lain. Tidak jauh dari arah timur teluk atau bandar Bima terdapat sebuah bukit kecil, orang Bima lama menyebutnya *Dana Babuju* (tanah gundukan, yakni Doro Dara sekarang), tempat berkumpulnya para Ncuhi untuk memusyawarahkan penyambutan ‘peradaban baru’ yang dibawa oleh orang asing, yakni Sang Bima. Konon, dari tempat inilah nama *Dana Mbojo* dinisbatkan untuk menyebut daerah hunian dari klan-klan para Ncuhi yang menyebar di wilayah Pulau Sumbawa bagian timur ini (Wawancara Dr. Maryam Salahuddin, 72, sejarawan Bima, 12 Agustus 2012).

Versi lain tentang nama Mbojo mengatakan bahwa itu berasal dari kata Jawa *Bojo* (istri), karena orang-orang yang mendiami wilayah ini adalah hasil perkawinan antara para imigran dari Jawa dengan penduduk setempat. Ada juga yang berasumsi bahwa Mbojo berasal dari nama Kamboja karena mengasumsikan bahwa orang-orang Bima awal adalah para pelaut dari negeri itu (Husain Laodet, 40, budayawan Bima, wawancara 11 Agustus 2012).

Tentang kapan mulai penyebutan nama Mbojo dan Bima masih menjadi perdebatan simpang-siur di kalangan pemerhati sejarah Bima. Pada masa-masa selanjutnya sampai sekarang, wilayah di bawah *Dana Babuju* ini menjadi pusat kekuasaan Kerajaan dan Kesultanan Bima. *Dana Babuju* sendiri menjadi situs pemakaman raja dan sultan Bima.

Sila yang terletak di pesisir barat daya teluk Bima juga menjadi tempat mukim yang ramai kedua setelah RasanaE. Kalau RasanaE menjadi daerah jangkar bagi wilayah-wilayah bagian timur seperti Rite, Wawo, Sape, dan Wera serta sebagian wilayah selatan teluk seperti Belo bahkan Karumbu, maka Sila adalah jangkar dan pintu masuk untuk wilayah-wilayah di bagian baratnya meliputi wilayah Bolo, Donggo, sebagian wilayah selatan di Woha dan Monta, bahkan sampai Dompu. Di daerah Sila inilah bermukim klan dari Ncuhi Bolo yang menguasai wilayah sekitarnya. Posisi Sila sebagai pusat kedua bagi Bima diperkuat dengan praktik politik era Kerajaan dan Kesultanan, bahwa calon raja/Sultan Bima selalu

ditempatkan dulu untuk memimpin wilayah ini sebelum masuk menjadi penguasa tunggal istana Bima.

Daerah Sila diyakini dibangun dan dikembangkan oleh para pelaut dari Bugis yang akhirnya menetap dan berniaga di sekitar daerah itu. Orang-orang di Daru dan Timu di Sila bagian timur yang berhadapan langsung dengan teluk masih menyimpan keyakinan bahwa nenek moyang mereka dari Goa dan Bugis. Banyak di antara mereka bahkan masih menziarahi sanak famili dan leluhur mereka yang berada di tanah Sulawesi.

Klaim tentang nama dan asal-usul selalu bervariasi. Di samping ada yang mengatakan nama Sila berasal dari nama marga yang terdapat di Sulawesi Selatan, juga ada anggapan bahwa nama itu diambil dari kata *Islam* yang menandai bahwa orang-orang yang mendiami wilayah inilah yang menginisiasi perkembangan Islam di Bima. Pertumbuhan kota-kota pesisir dan hubungan sosial-politik di antarwilayah ini pada gilirannya melahirkan kontestasi perebutan makna, terutama antara Bima (kota) sebagai pusat kekuasaan dan Sila (sebagai kota kedua).

Terdapat klaim-klaim mengenai keaslian Dou Mbojo. Ada yang beranggapan bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah Kecamatan Donggo (yang kelak disebut sebagai Dou Donggo) itulah penduduk asli Bima, tetapi jika merujuk kepada teori diaspora, atau teori asimilasi, atau teori preseden yang cenderung mengabaikan mana yang disebut penduduk asli dan mana yang disebut pendatang (Fox, 2008a, 2008b), maka menjadi jelas bahwa klaim-klaim itu hanya sebagai penegas posisi sosial dan identitas suatu komunitas. Namun demikian, yang jelas, sebelum kedatangan para pedagang dan pelayar dari berbagai wilayah Nusantara terutama dari daerah sekitar seperti Bugis, Makassar, Jawa, Bali, Lombok, dan Timor pada abad ke-14, di Dana Mbojo sudah ada penghuni yang mendiami beberapa wilayah. Entah dari mana mereka berasal, yang jelas pada masa Naka dan Ncuhi, mereka sudah dianggap sebagai penduduk asli yang mewariskan Dana Mbojo secara turun temurun.

Orang-orang yang pertama kali mendiami wilayah di Dana Mbojo yang kemudian diklaim sebagai penduduk asli mulai mengadakan kontak dengan para pendatang sampai terjadi kawin-mawin yang membentuk ikatan kekeluargaan dan jalinan kekerabatan (*kinship*) dan terjadi naturalisasi. Mereka inilah yang

kemudian mewarisi Dana Mbojo sebagai bumi pertiwi mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka menyebar dan menempati dataran-dataran rendah, pesisir, dan oase-oase yang subur di RasanaE, Sila, Bolo, Woja, Belo, dan Sape.

Dou Mbojo juga menyebar sampai ke wilayah Dompu dan Sanggar, yaitu daerah di bawah naungan dan lingkaran Gunung Tambora. Bahkan, di daerah ini mereka membentuk suatu kerajaan kecil seperti 'Ncuhi/kerajaan' Sanggar, Pekat, dan Tambora. Kerajaan-kerajaan ini menguasai wilayah sekitar Dompu dan sudah dikenal sebagai kerajaan penting di wilayah timur. Berberapa tafsiran sejarah atas perlambang yang ada, serta termaktubnya nama Dompu (Domp) dalam 'Sumpah Palapa' Gajah Mada menunjukkan keadaan dari wilayah ini. Legenda masuknya Sang Bima di wilayah sekitar ini – melalui Pulau Satonda di Teluk Saleh – menunjukkan strategisnya daerah ini dan sekitarnya.

Peradaban Dou Mbojo di Tambora luluh-lantak pada abad ke-18 ketika Gunung Tambora meletus pada 1815. Letusan ini telah mengubah peta demografi Dou Mbojo dan orang-orang di Pulau Sumbawa pada umumnya, bahkan pengaruhnya terasa sampai ke daratan Eropa yang membuat iklim berubah gelap sepanjang tahun (*year without summer*). Magma yang dimuntahkan oleh 'Pompey of the east' ini melumat hutan di sekitarnya dan mengubahnya menjadi kaldera raksasa. Bukan hanya itu, tiga kerajaan, yaitu Tambora, Pekat, dan Sanggar terkubur musnah. Populasi binatang seperti kerbau, sapi, menjangan, kuda, juga manusia ikut terkikis secara drastis. Diperkirakan 70-90 ribu penduduk hilang dan mati, berbarengan dengan terkuburnya dua kerajaan, yaitu Tambora dan Pekat (Dinas Pertambangan Provinsi NTB, 2011). Sebagian lagi penduduk yang tersisa mengungsi ke daerah-daerah lain yang aman, termasuk ke arah timur di daerah pegunungan Donggo dan Soromandi.

Kehadiran imigran dan evolusi perkembangan masyarakat Bima telah berlangsung sedemikian rupa sampai pada tahap terbentuknya suatu masyarakat yang berstruktur dengan citra kebudayaan tertentu (identitas). Dalam proses perjalanan sejarah sosial ini terjadi pergulatan dan dialektika yang intens sehingga dimungkinkan terbentuknya sistem-sistem kekuasaan seperti kerajaan dan kesultanan. Penertasi kaum pendatang dari suku-suku

Melayu dan suku-suku di Indonesia bagian timur ini sebagian melahirkan diaspora masyarakat, sebagian lagi melahirkan peminggiran-peminggiran seperti banyak dialami oleh penduduk asli yang disebut Dou Donggo.

Gelombang revolusi sosial yang terjadi pada dua era, yaitu era kerajaan dan era kesultanan, telah mengubah struktur masyarakat dan peta penyebaran penduduk. Revolusi pertama, yakni peralihan kekuasaan dari para Ncuhi ke penguasa Jawa yang berkepercayaan Hindu telah mentransformasi cara pandang masyarakat terhadap alam dan cara mereka berinteraksi dan mengelolanya. Kosmologi berbasis animisme-dinamisme diganti oleh sistem kepercayaan Hindu. Demikian juga cara hidup nomaden dan berburu diganti oleh budaya bercocok tanam. Tradisi lokal yang hidup dalam masyarakat beralih ke orientasi Jawa, tetapi peralihan itu justru memperkuat dunia batin Dou Mbojo, karena elemen kosmologi animisme-dinamisme dengan mudah berlebur dengan kepercayaan Hindu, maka lahirlah kepercayaan lokal bernama *Parafu*, suatu bentuk religi lokal yang berorientasi kepada fenomena dan kekuatan alam. Orang Bima menyebut kepercayaan ini sebagai kepercayaan *Makamba-Makimbi*, yang berorientasi kepada kekuatan ‘cahaya yang memancar’, simbol dari kekuatan mistik yang dikandung oleh benda-benda tertentu, serta kepada roh yang tetap hidup dan menetap dalam objek-objek tertentu (Ismail, 2008: 38). Kepercayaan ini menjadi anutan orang-orang di pegunungan dan pedalaman, terutama Dou Donggo di sebelah barat teluk.

Gelombang kedua revolusi sosial masyarakat Dana Mbojo adalah prahara politik di Kerajaan Bima pada abad ke-16 berupa pertikaian perebutan kekuasaan internal, yang berujung kepada terkuburnya era kerajaan dan lahirnya kesultanan. Peralihan kekuasaan dan sistem politik dari kerajaan ke kesultanan yang berlangsung secara drastis telah mengubah struktur sosial dan budaya Dou Mbojo. Islamisasi politik yang dibawa serta oleh perubahan struktur kekuasaan telah serta merta mengubah dimensi batin dan praktik kebudayaan Dou Mbojo kepada orientasi Islam. (Prager, 2010: 12). Kali ini, perubahan orientasi keagamaan dan budaya yang berlangsung sistematis dan massif, terasa lain, karena alih-alih memperkaya elemen-elemen lokalitas melainkan menggulung, menjungkir-balikkan, dan menguburnya, kemudian di atasnya

dibentangkan fondasi dan bangunan Islam

Tidak itu saja, revolusi sosial-politik ini diikuti oleh gelombang imigrasi yang difasilitasi oleh kekuasaan, terutama datangnya para prajurit dan penganjur Islam dari Makassar dan Minangkabau di Dana Mbojo. Mereka ini menempati kelas sosial istimewa dan mengusur penduduk setempat, membentuk komunitas Melayu dan peradaban baru di RasanaE (Kota Bima) dengan citra Islam yang kental.

Afiliasi politik dan kerjasama militer antara Bima dengan Goa dipererat oleh pertalian perkawinan antara sultan-sultan Bima awal (sampai sultan ke-6) dengan putri-putri istana Goa, melahirkan prototipe baru masyarakat Bima yang berwajah multikultur sebagaimana terlihat dari representasinya di RasanaE sebagai pusat kesultanan. Di situ bahkan terdapat pemukiman bernama Kampung Melayu, tempat para penganjur Islam dan kerabat istana dari tanah seberang (terutama Makassar) serta para pedagang dari bangsa Melayu bermukim. Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro adalah representasi bangsa Melayu (terutama Minang dan Makassar) yang telah berintegrasi ke dalam struktur masyarakat Bima. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong para penghuni yang lebih awal bergeser ke pegunungan dan membangun identitas kultural sendiri, seperti Dou Donggo yang membangun komunitas sendiri di seberang barat teluk Bima. Reposisi sosial ini, pada gilirannya melahirkan kontestasi kultural dan segregasi sosial di kalangan masyarakat Bima.

### **C. *Rawi Mbojo*: Supremasi Budaya Islam**

Mengalami beberapa gelombang transformasi dan menerima kehadiran orang luar, menjadikan Dana dan Dou Mbojo medan dialektika kultural. Dana Mbojo menjadi tempat bertemu dan bertarungnya berbagai kultur, terutama Melayu dari Jawa, Makassar, Banjar, Minangkabau, Aceh, dan pulau-pulau di wilayah timur Indonesia. Dengan kata lain, Dana Mbojo menjadi batas kultural (*cultural border*) antara barat dan timur Indonesia, di mana

Jika secara fisik bangsa Melayu digambarkan tipikal sebagai berambut lurus, berkulit sawo matang, bermata coklat, dan berhidung pesek (Muller, 1997: 83), maka sebagian besar dari ciri fisiologis itu juga menjadi penanda fisik Dou Mbojo. Satu pengamatan

menambahkan kecenderungan ke-Timur Tengah-an dengan mata binar kecoklatan, rambut bergelombang, dan kulit 'zaitun' (Just, 1996: 32). Ini jelas merupakan hasil dari persilangan beberapa suku bangsa. Di satu sisi, penampakan fisik Dou Mbojo tidak jauh dari citra orang-orang dari pulau-pulau sebelah timur, dan di sisi lain mirip dengan orang-orang dari pulau sebelah barat, yakni orang-orang dari suku Sasak, Bali, dan Jawa. Identitas pulau yang termasuk dalam jajaran Sunda Kecil memberi penguatan akan kedekatan ciri-ciri fisik ini.

Pergulatan historis yang berpadu dengan kondisi alam yang panas dan gersang membentuk karakter Dou Mbojo berwatak keras dan tidak mudah menyerah, *uncompromising rigorism* meminjam istilah Geertz (1960: 16). Dou Mbojo dikenal teguh memegang sesuatu yang menjadi keyakinannya, tetapi hal itu diatasi oleh prinsip loyalitas kepada otoritas pemimpin. Maka ketika Islamisasi yang berlangsung secara struktural, betapa pun mereka memegang teguh nilai-nilai dan tradisi lama, mereka pun tunduk kepada perintah raja atau sultan. Ketaatan struktural di satu sisi dan keteguhan terhadap tradisi lama di sisi lain pada tataran tertentu menyebabkan 'kerentanan' dan ambigu yang ketika menemukan wahana (*field*) akan menjadi 'pemberontakan'. Ketika Islam tertancap kuat selama berabad-abad sejak abad ke-16, Dou Mbojo pun menjadi Muslim dengan ciri ortodoks (Peacock, 1979), atau dalam pengertian lain fanatik (Muller, 1997: 100).

Supremasi Islam di tanah Bima telah merasuk sampai ke struktur batin manusianya, dan membentuk *habitus* yang melandasi berbagai tindakan sosio-kultural. Islam telah mengisi ruang kognisi dan relung kesadaran religiusitas masyarakat sehingga orientasi keagamaan Islam dalam tingkah laku sosial-politik-kultur menjadi penting, dan itu tertancap dalam dimensi kebudayaan. Islam telah menjadi nafas kebudayaan Bima.

Jika kebudayaan tampil dalam tiga wajah: artefak, perilaku, dan rekayasa (Purwoko, 2003), maka ketiganya jelas tergambar dalam berbagai peninggalan historis, tradisi masyarakat (*living tradition*), dan ideologi. Istana Bima dengan berbagai relik-relik di dalamnya adalah bukti kuat tegaknya Islam di Dana Mbojo. Demikian juga Masjid Kesultanan, kuburan-kuburan para sultan dan para ulama, serta perpustakaan Islam juga merepresentasikan

supremasi Islam. Khazanah intelektualisme Islam tersimpan dalam kepustakaan istana serta Museum Samparaja, yang mengoleksi peninggalan kitab-kitab klasik bernuansa Arab dan Melayu peninggalan Sultan Salahuddin.

Islam yang semula elitis merambah ke bawah melalui strategi ‘*top down*’ dan merasuk ke dalam perilaku budaya masyarakat. Nuansa Islam Arab sangat kentara dalam pola penamaan yang berbau Arab, serta dalam praktik budaya seperti pernikahan dan festival serta praktik-praktik ritual. Citra ke-Arab-an ini menjadi ukuran kesalehan keagamaan dan parameter moral tingkah laku. Semua hal berbau Islam itu disebut Rawi Mbojo (*rawi* artinya perbuatan), yaitu praktik, tradisi, atau budaya yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti *ngaji karo’a* (membaca al-Qur’an), memberi nama Arab, *qasidah* rebana, *kobi gambo* (bermain gambus) dan sebagainya. Sedemikian rupa Islam menjadi habitus, kesadaran yang tersimpan dalam dunia batin, sehingga tercetus dalam gerak-gerik kehidupan sehari-hari, menjadi praktik budaya. Sebagai contoh, barangkali hanya di Bima ada kebiasaan reflektiftatkala seseorang terantuk atau melakukan sesuatu yang tak disengaja secara spontan mengucapkan kata ‘Muhammad!’.

Islam juga menjadi cita-cita sosial Dou Mbojo, tercermin dalam penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan syari’ah pada masa kesultanan. Demikian juga pada era kontemporer saat nilai-nilai Islam diterapkan dalam bentuk Perda Syari’ah, Jum’at Khusus, Pembumian al-Qur’an, Jilbabisasi siswi dan pegawai pemerintah, dan Islamisasi birokrasi, dimulai kembali pada masa pemerintahan Bupati H. Zainul Arifin (2000-2005).

Masuknya semangat puritanisme keagamaan dalam proses Islamisasi terutama melalui organisasi Muhammadiyah telah menambah bobot ideologi Islam yang mewujud dalam perlawanan terhadap praktik keagamaan sinkretik (Prager, 2010). Pergulatan Islam sebagai cita-cita sosial juga pernah melahirkan generasi-generasi militan dalam berdakwah, digodok dalam wadah bernama Persatuan Islam Bima (PIB). Tokoh-tokoh dakwah dan pendidikan Islam seperti Syekh Abdul Gani, Tuan Imam Abdurrahman Idris, Sehe Boe, Syekh Abubakar Husain, Kiai Said Amin, H. Abdul Ghani Masykur, dan Kiai Muhammad Hasan lahir dari situasi ini. Lebih dari itu, praktik perjuangan cita-cita sosial Islam lewat politik



bernuansa kekerasan juga pernah melibatkan aktivis-aktivis Islam dari Bima seperti pada Peristiwa Cikini 1957, Peristiwa Donggo 1972, Peristiwa Lampung 1989, dan Peristiwa Sanolo 2012 yang baru lalu.

Sebagai masyarakat yang mengalami berbagai dialektika sejarah yang panjang, karakter akomodatif juga tampak dalam banyak hal. Gambaran orang Bima yang susah menerima orang luar (Muller, 1997: 100) tidak sepenuhnya benar. Penerimaan terhadap kehadiran Sang Bima dari tanah Jawa dan adopsi cara hidup dan tata sosial-politik yang dibawa sertanya, terlepas apakah di dalamnya terdapat unsur pemaksaan dengan kekuatan senjata yang membuat para Ncuhi takluk, jelas menunjukkan egalitarianisme manusia Bima (Marewo, 46, budayawan Bima, wawancara 15 Agustus 2012). Tanda itu bisa juga dilihat dari aliansi strategis Bima dengan Makassar yang memungkinkan terjadinya gelombang emigrasi dari luar beserta transformasi sosial-budaya yang mengiringinya. Di Bima terdapat Kampung Melayu yang dihuni oleh pendatang dari bangsa Melayu dari Makassar dan Minang, di mana mereka menempati kelas sosial tinggi dan istimewa, bebas dari pajak (Sedyawati 2007: 175). Penduduk beretnis Arab, Cina, Madura, Sasak, Bali, Ende, dan Flores pun menemukan tempat hidup di Dana Mbojo.

Semua itu dimungkinkan oleh adanya karakter dasar keterbukaan dan kepandaian Dou Mbojo menyikapi keadaan. Sebuah bangsa tidak bisa tegak tanpa aliansi dan hubungan baik dengan pihak luar. Kalau Kesultanan Sumbawa mengaitkan asal-usulnya dengan Banjarmasin, maka Kesultanan Bima memiliki sejarah asal-usulnya dengan penguasa Jawa, yaitu Hindu-Majapahit sekaligus tetap menjaga relasi yang baik dengan budaya Muslim dari Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, khususnya setelah konversi era 1630-an (Noorduyn, 1987 dalam Steenbrink, 2007: 85). Aliansi sosial-politik ini jelas melahirkan perpaduan budaya dalam struktur masyarakat. Lambang Dana Mbojo berupa garuda berkepala dua, merefleksikan perpaduan antara 'hadat' dan 'syara', adalah representasi dualisme adat warisan kebudayaan Jawa sejak era Kerajaan dan agama Islam yang bersumber dari Sulawesi – sebagai salah satu poros Melayu – yang berlangsung pada era Kesultanan.

Perpaduan dua corak kebudayaan ini memunculkan karakter yang unik dari Dou Mbojo dengan berbagai dinamika sosial-politik

dan ekspresi kulturalnya. Menerima orang dan kebudayaan lain dari luar sambil memegang teguh nilai dan adat istiadat setempat, misalnya, tercermin dalam budaya *rimpu*. Rimpu adalah penggunaan dua lembar kain sarung oleh kaum perempuan, satu dililitkan di kepala berfungsi sebagai penutup bagian kepala sebagaimana fungsi jilbab, yang lain dilingkarkan di badan bagian bawah untuk menutupinya sebagaimana fungsi rok. Dalam budaya rimpu terkandung unsur inkulturasi, yaitu penyerapan nilai-nilai agama Islam yang disesuaikan dengan adat istiadat setempat. *Rimpu* dapat dikatakan sebagai fenomena 'pribumisasi' Islam, di sisi lain dapat berarti penolakan terhadap Arabisasi Islam, atau negosiasi antara ajaran-ajaran universal dengan kearifan lokal yang kemudian menjadi identitas wanita Bima (Wardatun, 2011).

Ritual keagamaan Islam menjadi bagian dari tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Orang Muslim di Bima, sebagaimana di Jawa atau di Goa, misalnya, juga mengenal doa selamat atau kenduri untuk siklus hidup seperti doa selamat menjelang lahir atau 7 bulan kehamilan (*kiri loko*), kelahiran, sunatan, pernikahan, kematian, naik haji, bangun atau pindah rumah, serta doa-doa yang terkait dengan waktu-waktu tertentu yang dianggap mempunyai keistimewaan (*fadhilah*) seperti doa *nisfu sya'ban* dan doa *syawal*. Praktik ritual keagamaan dan doa-doa ini juga dilakukan untuk tujuan dan kesempatan tertentu seperti *Doa Dana*, doa komunal dengan cara duduk bersama di tanah lapang, jalan raya, atau persawahan untuk memohon bebas dari bala dan bencana yang menimpa penduduk, atau memohon jauh dari hama dan kekeringan. Doa-doa seperti ini menjadi praktik umum dalam masyarakat agraris dan guyub seperti masyarakat Muslim Bima, meskipun terdapat segmentasi Muslim puritan yang tidak melaksanakan bahkan menentangnya (Prager, 2010).

Di samping ritual-ritual itu, terdapat pula apa yang disebut '*rawi na'e Dou Mbojo*' (kegiatan besar orang Bima) berupa perayaan dan festival keagamaan. *Rawi na'e* dikenal ada 3 kesempatan, yaitu perayaan *Idul Fitri* (merayakan hari kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan), *Idul Adha* (merayakan hari haji di mana kaum Muslim di seluruh dunia *wukuf* atau berkumpul di Arafah Saudi Arabia), dan *Hanta U'a Pua* (mengangkat sirih puan, memperingati kehadiran Islam di Bima, biasa dilaksanakan

bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad). Perayaan-perayaan *Maulid Nabi*, *Isra' Mi'raj*, dan *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ) juga merupakan momentum keagamaan yang menjadi perhatian dan kesadaran bersama masyarakat Muslim.

Sebagai medan pertemuan budaya dan tradisi, masyarakat Bima pada dasarnya berciri pluralistik. Terlihat pengaruh-pengaruh Melayu, terutama Aceh dan Sumatra Barat, serta Jawa dan Goa kental dalam tradisi masyarakat. Pengaruh kepercayaan Hindu dan Budha juga bisa dilihat, misalnya dalam praktik samanisme atau perdukunan, serta *Toho Dore* (sesajen), terutama dilakukan oleh masyarakat Muslim pedalaman atau pegunungan.

Dari segi agama, selain Islam yang menjadi agama mayoritas sejak era Kesultanan, juga berkembang agama lain seperti Kristen (Katolik dan Protestan) yang banyak dianut oleh pendatang dari timur, Hindu yang banyak dianut oleh orang-orang Bali, dan Budha yang banyak dianut oleh etnis Cina.

Peta pemeluk agama di atas menggambarkan pluralitas masyarakat Bima, meskipun beberapa wilayah (8 dari 18 kecamatan di Kabupaten Bima) bersifat monolitik, hanya dihuni oleh penduduk Muslim, bukti dominasi Islam begitu kuat. Kecamatan Sape dan Woha menyebar komposisi penganut agamanya. Sementara Bolo, Wawo, dan Wera hidup dua agama, tetapi selain Islam jumlahnya tidak signifikan. Kecamatan Donggo dan Madapangga tanpak signifikan jumlah penduduk Kristen, dan di dua kecamatan ini hanya hidup dua agama itu, membentuk konfigurasi hubungan dinamis antara Islam dan Kristen sebaaimana diulas dalam bab-bab berikut.

#### **D. Dou Donggo di Persimpangan**

Di luar gambaran mengenai *Dana*, *Dou*, dan *Rawi* Mbojo di atas, terdapat segmentasi masyarakat Bima yang menunjukkan suatu identitas dan pengalaman kultural yang agak berbeda, serta dalam banyak kesempatan mengkontestasiannya dengan entitas dominan Dou Mbojo. Mereka adalah komunitas Dou Donggo yang tinggal di pegunungan, khususnya pegunungan sebelah barat teluk. Kata *donggo* sendiri dalam bahasa Bima berarti gunung.

Dou Donggo mendiami wilayah-wilayah di dataran tinggi sebelah barat Teluk Bima atau di seputaran Gunung Soromandi, gunung tertinggi di bagian timur Pulau Sumbawa, terutama di

sebelah selatan dan baratnya sampai ke arah barat daya di bawah Doro Leme. Di sebelah barat Gunung Soromandi ada Kampung Sampungu, Sai, dan Sowa di sebelah selatannya ada Punti, Sarita, dan Bajo, di sebelah barat semakin naik ada Kananta, Manggekompō, Kala, Doridungga, ke selatan lagi ada O'o, Mpili, dan Mbawa, serta Palama dan Padende (yang sudah masuk ke dalam Kecamatan Madapangga). Kampung-kampung ini disebut dengan DonggoDi (*di* bahasa Bima berarti sebelah barat). Sebagian orang menyebut Donggo *Ipa* (*ipa* bahasa Bima berarti seberang) (Fachrir, 2014). Sebelum pemekaran wilayah tahun 2002 kampung-kampung ini masuk ke dalam Kecamatan Donggo, sekarang sebagian masuk ke dalam Kecamatan Soromandi, kecamatan pecahan.

Istilah Dou Donggo juga digunakan untuk menyebut mereka yang tinggal di beberapa kampung di Pegunungan Lambitu sebelah timur teluk Bima dan RasanaE. Kampung-kampung itu adalah Sambori, Teta, Kuta, Tarlawi, dan Kalodu. Dulu daerah ini bagian dari Kecamatan Wawo, tetapi sekarang terhimpun dalam kecamatan tersendiri, yaitu Kecamatan Lambitu. Mereka yang tinggal di kampung-kampung ini disebut Dou Donggo *Ele* (*ele* bahasa Bima berarti timur).

Dou Donggo Di dan Dou Donggo *Ele* sering dianggap sebagai penduduk asli Bima, sebagaimana mereka juga mengklaim hal itu. Konon, mereka ini semula mendiami daerah-daerah pesisir, kemudian menyingkir ke pegunungan akibat terdesak oleh kaum pendatang dan konsekuensi kekalahan resistensi mereka terhadap hal-hal baru, seperti agama Hindu maupun Islam dalam eranya masing-masing. Di daerah pegunungan itu mereka membentuk kelas sosial dan identitas sendiri. Dou Donggo *Ele* yang tinggal di Pegunungan Lambitu bahkan memiliki bahasa dan dialek sendiri, namanya *Nggahi* Sambori (bahasa Sambori), yang berbeda dengan dialek dan bahasa Bima, meskipun mereka juga berbahasa Bima. Sementara Dou Donggo Di memiliki *sentu* (dialek) tersendiri yang membedakan dari *sentu-sentu* lain di Bima, bahkan dengan *sentu* Sambori di Donggo *Ele*. Di Bima sendiri terdapat banyak dialek, antara lain *sentu* Mbojo (RasanaE), *sentu* Sape, *sentu* Sila, *sentu* Parado, *sentu* Donggo, *sentu* Wera, *sentu* Ngali, *sentu* Karumbu, dan sebagainya. Dou Donggo *Ele* menggunakan bahasa Bima sambil berbahasa Sambori, sementara Dou Donggo Di hanya menggunakan

bahasa Bima dengan *sentu* Donggo (Alan Malingi, 43, sejarawan Bima, wawancara 11 Agustus 2012).

Fenomena ini menjadi bahan penelusuran antropologis yang menarik, misalnya mengapa di antara kedua Donggo ini memiliki ciri identitas yang berbeda dari segi bahasa. Apakah mereka dulu berasal dari etnis yang berbeda, hadir bersama-sama di *Dana Mbojo*, kemudian memilih tempat bermukim yang berbeda berdasarkan etnisitas tersebut. Ataukah mereka dulu hidup bersama lalu terpisah karena konflik dan mencari tempat bermukim masing-masing. Ataukah mereka hidup di satu wilayah kemudian sama-sama terdesak oleh kaum imigran dan terpisah menjadi dua bagian berdasarkan etnisitas itu, yang satu ke barat bernaung di bawah Pegunungan Soromandi sedang yang lain bertengger di sekitar Gunung Lambitu di wilayah timur.

Sejumlah diskusi di kalangan pemerhati Bima pada awal 2014 meletakkan versi argumentasi dan asumsi mengenai Donggo *Ele* ini dengan bersandar kepada cerita rakyat atau dongeng. Dalam dongeng yang bertajuk *La Bibano*, misalnya, dikatakan bahwa sebelum tumbuh Kerajaan Bima di *RasanaE*, sudah berdiri sebuah kerajaan bernama *Kalepe*. Wilayah kekuasaannya di daerah pesisir selatan yang berhadapan dengan Laut Hindia, tepatnya di *Lere Parado* dan sekitarnya. Di kerajaan itu hidup seorang putri jelita, tidak lain dari putri raja *Kalepe*. Suatu saat, raja muda dari kerajaan Bima yang baru tumbuh memasuki daerah kekuasaan *Kalepe* untuk berburu, dan menemukan sang putri. Merasa jatuh hati, sang raja muda pun melamar sang putri. Karena titah kakak dan raja, lamaran itu tak kuasa ditolak, tetapi betapa kecewa hati sang putri setelah menjelang hari pernikahan dia dapati sang pangeran ternyata buruk rupa. Ia pun memutuskan sepihak pertunangan itu dengan siasat. Merasa dipermalukan, kerajaan Bima menyerang kerajaan *Kalepe* dan meluluhlantakkan istana dan perkampungan. Sang putri berhasil melarikan diri ke pulau seberang (*Sumba*), sang raja *Kalepe* meninggal, sementara rakyatnya bercerai-berai (Ibrahim, 2015).

Cerita mengenai *La Bibano* sendiri hanya sampai di sini, tetapi para pemerhati membangun asumsi darinya bahwa setelah penaklukan itu sebagian rakyat *Kalepe* melarikan diri ke arah barat, sebagian lagi menuju ke arah timur. Mereka menyelamatkan diri ke daerah-daerah pegunungan. Mereka yang ke barat itulah yang

kemudian menjadi cikal bakal Dou Donggo *Di* sementara yang menuju timur menjadi cikal bakal Dou Donggo *Ele*. Ceritera ini bukan saja mengenai asal usul atau penyebaran penduduk, tetapi juga merefleksikan suatu pergulatan antarkomunitas yang sudah berlangsung sejak lama. Sebagai sebuah cerita rakyat, terlepas dari adanya unsur imajinasi di dalamnya, tutur ini menampilkan konstruksi tentang realitas masa lampau yang penuh romantika dan konflik. Yang menarik bagi peneliti adalah mengaitkan cerita ini dengan hubungan sosial kekinian antara masyarakat yang tinggal di pegunungan dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah (kota) yang senantiasa menebarkan semangat kooptasi. Sementara itu, perlawanan dan resistensi yang diberikan oleh Dou Donggo, jangan-jangan, diilhami oleh dendam sejarah atas kekalahan-kekalahan masa lampau itu.

Kembali kepada pemilahan, dalam konteks kekinian, citra Dou Donggo lebih melekat kepada Donggo *Di* daripada Donggo *Ele*. Hal ini karena populasi Donggo *Di* lebih banyak dan cakupan wilayahnya lebih luas. Penggunaan kata Donggo sebagai nama kecamatan bagi Donggo *Di* juga menegaskan bahwa merekalah yang berhak menyandang sub-kultur atau sub-etnis Donggo, serta membuat mereka lebih populer daripada orang-orang yang ada di pegunungan Lambitu. Selain itu, Dou Donggo *Di* memiliki hubungan historis yang lebih dinamis dengan pusat kekuasaan Bima, baik di masa kerajaan/kesultanan sampai masa kontemporer, dibandingkan dengan orang-orang di Sambori dan sekitarnya yang tampak sama sekali terasing dari pusat kekuasaan. Banyak peristiwa sosial-politik di Bima yang melibatkan orang-orang Donggo *Di*, seperti Peristiwa Donggo 1972 dan pembakaran Gereja di Mbawa 1969, yang membentuk citra diri Donggo *Di* di kalangan mereka sendiris sebagai pemberani dan di kalangan orang luar (Dou Mbojo) sebagai pemberontak.

Cerita-cerita heroik dari peristiwa-peristiwa itu dan munculnya tokoh-tokoh dari Donggo *Di* dalam percaturan politik Bima menegaskan suatu identitas bagi Donggo. Donggo kemudian identik dengan masyarakat pemberontak, keras, kaku, kasar, dan citra pejoratif lainnya. Pada gilirannya, ketika orang menyebut Dou Donggo, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang mendiami kampung-kampung di Donggo *Di*, dengan mengeluarkan Donggo

*Ele* dalam komunitas itu. Dengan kata lain, supremasi Dou Donggo ada di wilayah barat teluk Bima, yang sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Donggo, Soromandi, dan sebagian Madapangga, bahkan ada yang masuk bagian Kabupaten Dompu.

Dari paparan di atas, dapat dibangun suatu argumentasi bahwa penyebutan Donggo *Di* dan Donggo *Ele* adalah konstruksi sosial politik dari suatu pertarungan memperebutkan makna dan hegemoni atas wilayah. Pihak-pihak yang bertarung itu ialah pusat kekuasaan Bima (kota) dengan Sila sebagai representasi kekuatan lain di luar pusat kekuasaan yang mengambil posisi oposan. Dalam pertarungan ini, Dou Donggo berada di tengah kisaran pergulatan yang membuat komunitas ini ambigu dan bahkan antagonis di hadapan pusat kekuasaan Bima.